

EVALUASI PROGRAM DISTRIBUSI SUBSIDI LPG 3 KG DI KOTA SURABAYA

¹⁾A. Tsani Sabhan Febrian, ²⁾Virdean Paulia Pratama, ³⁾Karyn Margaretha,
⁴⁾Nabila Oktaviani, ⁵⁾Maria Equina Rotua Simanjuntak*

^{1), 2), 3)}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

¹⁾brian.tsani07@gmail.com, ²⁾virdeanpaulia@gmail.com,

³⁾karynmargaretha123@gmail.com, ⁴⁾nabilaon10@gmail.com,

⁵⁾maria.equina27@gmail.com

*maria.equina27@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan kebijakan terkait wajib KTP dan KK bagi kelompok sasaran mengakibatkan program distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui arah jalannya program. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian evaluasi program distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan pendistribusian LPG subsidi 3 kg yang ada di Kota Surabaya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memberikan gambaran lengkap sesuai topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data oleh Miles & Huberman juga digunakan dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dengan indikator evaluasi seperti efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan telah menunjukkan bahwa pelaksanaan program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya telah terealisasi dengan baik. Melalui penggunaan *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite tentunya juga turut mewujudkan proses distribusi subsidi LPG 3 kg yang merata bagi kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Adapun Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam senantiasa melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk mengetahui perkembangan program agar lebih tepat sasaran.

Kata Kunci : Distribusi, Evaluasi, LPG, Subsidi

Abstract

The update of policies related to mandatory ID cards and family cards for the target group has resulted in the 3 kg LPG subsidy distribution program in the city of Surabaya needs to be evaluated to find out the direction of the program. The evaluation of the 3 kg LPG subsidy distribution program in the city of Surabaya aims to find out the results of the implementation of the 3 kg subsidized LPG distribution policy in the city of Surabaya. The research method uses qualitative method with a descriptive approach to provide a complete picture according to the topic discussed. This study uses

policy evaluation theory by William N. Dunn. Data collected by interviews, observations and documentation. Then, data analysis techniques by Miles & Huberman were also used in data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study with evaluation indicators such as effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy have shown that the implementation of the 3 kg LPG subsidy program in the city of Surabaya has been well realized. Through the use of Merchant Apps Base Pertamina Lite, it also contributes to the process of distributing 3 kg LPG subsidies evenly for community groups who are entitled to receive it. The Surabaya City Government through the Subdivision of Planning and Supervision of Micro, Small Economy and Natural Resources of the Economy and Natural Resources Section always conducts thorough supervision to find out the development of the program so that it is more on target.

Keyword : *Distribution, Evaluation, LPG, Subsidies*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang telah ada dari masa ke masa. Kemiskinan diartikan sebagai tingkatan hidup yang tergolong rendah, dimana segelintir orang merasakan hidup serba kekurangan dari sisi materi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Nafi'ah, 2021). Permasalahan kemiskinan menjadi suatu persoalan yang hingga kini masih harus diperhatikan oleh suatu negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia tidak lepas dari adanya ketimpangan dari sisi pendapatan, kondisi geografis, tingkat pendidikan, maupun keadaan dari lingkungan itu sendiri (Purwanto, 2007).

Dalam menangani permasalahan kemiskinan, pemerintah turut berupaya melalui beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah melindungi keluarga atau kelompok masyarakat miskin dengan pemenuhan kebutuhan dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan agar masyarakat miskin memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan agar dapat bekerja dengan memanfaatkan kemampuan tersebut (Ferezagia, 2018). Di sisi lain, Pemerintah Indonesia berfokus pada kebijakan baik dari sisi ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Pada ekonomi makro pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menstabilkan harga barang, sedangkan pada ekonomi mikro pemerintah akan memberikan bantuan langsung seperti bahan pokok maupun subsidi tunai (Sigit & Kosasih, 2020).

Sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa subsidi LPG 3 kg sebagai salah satu program subsidi yang diharapkan dapat dinikmati dan meringankan keluarga atau masyarakat miskin. Selain itu, dibuatnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran juga mendukung dan menciptakan efektivitas penyelenggaraan program pemerintah dalam mengentas kemiskinan.

Mengutip dari laman (CNBC Indonesia, 2021) *Institute for Development of Economics and Finance* menyatakan bahwa volume penyaluran LPG 3 kg bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022 dan 2023, didapati kuota LPG subsidi sebanyak 8 juta ton dengan realisasi hanya 7,8 juta ton. Kemudian, pemerintah pada tahun 2024 menetapkan kuota LPG 3 kg sebanyak 8,03 juta ton. Sehingga anggaran subsidi LPG 3 kg juga terus melonjak dari Rp 54,15 triliun pada 2019 menjadi Rp 66,3 triliun atau naik 22,4%. Semakin beratnya beban subsidi untuk LPG 3 kg juga terlihat dari anggaran subsidi LPG terhadap anggaran subsidi dari 9,9% pada 2013, dan mengalami kenaikan menjadi 39,7% pada 2017 dan 49,5% pada 2022. Dengan ini, pemerintah mewajibkan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP secara nasional untuk menekan konsumsi LPG 3 kg di tahun 2024.

Mengutip dari (CNBC Indonesia, 2021) di Indonesia distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi saat ini masih bersifat terbuka, sehingga seluruh golongan masyarakat dapat mengakses komoditas bersubsidi tersebut. Realitanya sekitar 75% dari anggaran subsidi LPG masih dinikmati oleh

masyarakat kelas menengah ke atas. Padahal seharusnya LPG 3 kg memiliki sasaran pengguna yakni rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani jika disesuaikan dengan ketentuan yang telah berlaku.

Berdasarkan data (BPS, 2023) penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2023 mencapai 41.416.407 dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 10,35% yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan distribusi subsidi LPG 3 kg sebagai suatu program bagi masyarakat miskin. Mengutip dari (Liputan 6, 2023) diketahui bahwa ketersediaan LPG pada beberapa daerah di Jawa Timur dapat dikatakan aman karena setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur terdapat pangkalan resmi LPG Pertamina. Pangkalan LPG 3 kg di Jawa Timur mencapai 39.931 pangkalan. Adapun stok LPG di Jawa Timur sebesar 24.377 metrik ton dengan total konsumsi harian mencapai 4.673 metrik ton sehingga seharusnya tidak terjadi kelangkaan stok.

Kota Surabaya sebagai ibu kota dari Jawa Timur memiliki penduduk yang paling banyak yakni 2.893.698 pada tahun 2023. Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 136,37 ribu jiwa pada tahun 2023. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait sistem pembelian gas LPG 3 kg yakni masyarakat harus membawa atau menyertakan KTP dan KK yang juga terdaftar dalam sistem *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite. Meskipun ketersediaan LPG 3 kg di Kota Surabaya sangat mencukupi, namun dengan adanya pembaharuan kebijakan yang terkait diharapkan agar pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran bagi masyarakat miskin (Jawa Pos, 2024). Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya masih terdapat pendistribusian subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran di Kota Surabaya. Berdasarkan data (BPS, 2020) distribusi LPG di Kota Surabaya mencapai 84,15%. Dalam presentase tersebut masyarakat golongan mampu juga membeli LPG tabung 3 kg karena harganya yang murah apabila dibandingkan dengan LPG yang lain. Selain itu, didapati adanya KTP ganda atau praktik pinjam KTP orang lain untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kg. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak ideal, mengingat bahwa subsidi LPG diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau kelompok sasaran di Kota Surabaya.

Meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan terkait pendistribusian subsidi LPG 3 kg melalui sistem wajib KTP dan KK yang disesuaikan dengan data pada *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite, berjalannya program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya tentunya masih perlu dilakukan evaluasi program. Kegiatan evaluasi ini sangat penting dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan dan tindakan ketika melakukan evaluasi. Melihat apakah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja kebijakan apabila terdapat hal yang tidak sesuai, lemah atau kurang khususnya terkait kebijakan subsidi LPG 3 kg. Mengingat proses pendistribusiannya yang harus hati-hati, sehingga perlu adanya pengawasan atau evaluasi program untuk melihat sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran.

Program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya perlu dilihat sejauh mana telah berjalan dan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau teori evaluasi tertentu. Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori evaluasi dari William Dunn (1994) dalam (Subarsono, 2005). Teori tersebut tepat untuk menganalisis evaluasi program

distribusi subsidi LPG 3 kilogram (kg) di Kota Surabaya yang sebelumnya telah menuai permasalahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Evaluasi Program Distribusi Subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya” dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan pendistribusian LPG subsidi 3 kilogram (kg) di Kota Surabaya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memberikan gambaran lengkap sesuai topik yang dibahas. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang meliputi wawancara oleh narasumber dan data sekunder yang meliputi publikasi pemerintah, situs web, dan internet. Dalam hal ini, data dan informasi mengenai “Evaluasi Distribusi LPG Subsidi 3 kg di Kota Surabaya” yang diperoleh dan ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam akan dibuat dengan sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, penentuan informan dilakukan dengan memilih informan kunci melalui teknik *snowball sampling*.

Fokus pada penelitian ini adalah evaluasi distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya dan dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Dunn (1994) dalam (Subarsono, 2005) mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator evaluasi kebijakan, yaitu: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dalam memperoleh data yang mampu menggambarkan keadaan evaluasi distribusi LPG Subsidi 3 kg di Kota Surabaya. Sejalan dengan hal tersebut, teknik analisis data oleh Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2015) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk memperoleh berbagai temuan hasil penelitian yang telah dikumpulkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Program distribusi subsidi LPG atau *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg dapat dikatakan sebagai program subsidi dari pemerintah kepada masyarakat dalam upaya mengentas kemiskinan. Pada pelaksanaannya, subsidi LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau kelompok sasaran. Namun seiring berjalannya waktu diketahui bahwa banyak pengguna gas LPG 3 kg berasal dari para pengusaha, industri ataupun masyarakat yang tergolong mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentunya mampu menimbulkan keresahan bagi golongan masyarakat kurang mampu yang merasa terbebani ketika stok gas LPG 3 kg di pangkalan/pengecer terjadi kelangkaan. Berangkat dari permasalahan seputar distribusi subsidi LPG 3 kg, pemerintah telah melakukan pembaharuan aturan tentang tata cara pembelian gas LPG 3 kg dengan sistem wajib KTP dan KK yang disesuaikan dengan data pada *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite ketika datang ke pangkalan/pengecer agar pendistribusian LPG 3 kg dapat tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terkait realisasi dan kuota LPG tabung 3 kg di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat bahwa realisasi di Kota Surabaya sampai dengan desember 2023 sebanyak 115.216 dengan kuota sebesar 111.885 atau total realisasi dan kuota sejumlah 103,0%. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat perubahan kuota penerima dan pendistribusian menjadi 114.878 bagi Kota Surabaya. Umumnya, pendistribusian dapat dipahami sebagai kegiatan dalam proses pemasaran oleh distributor untuk menunjang penyampaian barang maupun jasa yang produksi oleh produsen dan ditujukan kepada konsumen. Dalam hal ini, untuk mengetahui perkembangan program pendistribusian subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya tentunya masih perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap proses pelaksanaannya. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini dilakukan melalui analisis dengan 5 (lima) indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1994) dalam (Subarsono, 2005) yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya sudah berjalan bertahun-tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai subsidi LPG 3 kg. Dalam evaluasi kebijakan publik terdapat tahapan untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu program atau kebijakan. Dalam hal ini, tingkat efektivitas sendiri dapat dilihat dari hasil yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran atau evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Siti A'isyah selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya yang mengawasi pelaksanaan program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya menunjukkan bahwa program tersebut sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM.

Adapun hasil yang diperoleh dari tahapan evaluasi melalui indikator efektivitas dari program subsidi LPG 3 kg dapat dikatakan sudah berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat pendistribusian subsidi LPG 3 kg ini sudah berjalan dengan efektif yakni dikonsumsi oleh masyarakat miskin atau kelompok sasaran. Selain itu pihak Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan penyaringan terhadap restoran, *laundry*, dan *workshop* agar tidak menggunakan subsidi LPG 3 kg dalam kegiatan operasionalnya karena subsidi ini ditujukan untuk kelompok sasaran saja. Dari penelitian ini juga mendapat hasil yakni Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2023 telah menjalin komunikasi yang baik mengenai pendistribusian kepada pihak agen atau pangkalan sesuai dengan kuota yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pendistribusian juga sudah terealisasi dengan baik dan efektif.

2. Kecukupan

Kecukupan menjadi salah satu indikator evaluasi dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan tercapainya tujuan kebijakan (Huda et al., 2021). Dalam hal kecukupan, kebijakan program subsidi LPG 3 kg di Surabaya dapat dinilai melalui seberapa jauh program tersebut dapat memecahkan masalah di

masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam program subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran mewujudkan ketersediaan dalam jumlah yang memadai, mutu baik, dan harga yang terjangkau. Sejalan dengan ini, kuota LPG Kota Surabaya tahun 2024 sebanyak 114.878 Metric Ton (MT). Kuota tersebut ditentukan atas usulan kebutuhan Kota Surabaya, sehingga ketersediaan LPG dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melakukan survei berat LPG di berbagai pangkalan. Apabila ditemukan berat tabung tidak sesuai, Pemerintah Kota Surabaya memberikan sanksi terhadap pangkalan terkait dan merekomendasikan untuk tidak dijual ke masyarakat agar mutu LPG 3 kg tetap terjaga dengan baik.

Pemerintah Kota Surabaya juga telah menerapkan strategi baru dalam menyalurkan subsidi LPG tabung 3 kg melalui pendataan dan pencocokan data konsumen pengguna LPG tabung 3 kg. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg agar besaran subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pengguna LPG tabung 3 kg dapat memeriksa statusnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di sub-penyalur/pangkalan resmi. Sedangkan bagi pengguna yang belum terdata, akan dapat bertransaksi setelah mendaftar pada *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite dengan dibantu oleh sub-penyalur atau pangkalan. Dalam hal ini, subsidi yang tepat sasaran akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal kecukupan, kebijakan program subsidi LPG 3 kg di Surabaya telah menjawab permasalahan yang ada dan mampu menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat Kota Surabaya.

3. Pemerataan

Dalam kebijakan publik, pemerataan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesamaan yang terjadi seperti halnya ketika suatu program/kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila memiliki manfaat yang merata bagi setiap lapisan masyarakat (Wowiling et al., 2018). Terkait evaluasi program distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya dapat diketahui bahwa sejak 1 Januari 2024 pelaksanaan pembelian LPG tabung 3 kg hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari masyarakat diluar kelompok sasaran yang turut menikmati program subsidi LPG 3 kg.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pembaharuan data kuota dan realisasi secara berkala telah dilakukan untuk mengetahui jumlah kelompok sasaran selaku pengguna yang terdaftar dalam program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya. Dalam hal ini, indikator pemerataan pada program distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya dapat dikaji dari sisi biaya dan manfaat. Pada pelaksanaannya, pihak Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam hanya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas dari pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada pihak PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dan pendistribusian subsidi LPG tabung 3 kg oleh *subholding* PT Pertamina Patra Niaga kepada masyarakat selaku kelompok sasaran di Kota Surabaya. Selain itu, keberadaan program subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya yang terus

dibenahi tentunya memberikan manfaat yang merata bagi kelompok sasaran karena melalui penggunaan *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite juga turut memaksimalkan proses distribusi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sehingga pada indikator pemerataan ini telah berjalan merata sebagaimana mestinya karena peran pengawas dari Pemerintah Kota Surabaya serta digencarkannya *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite.

4. Responsivitas

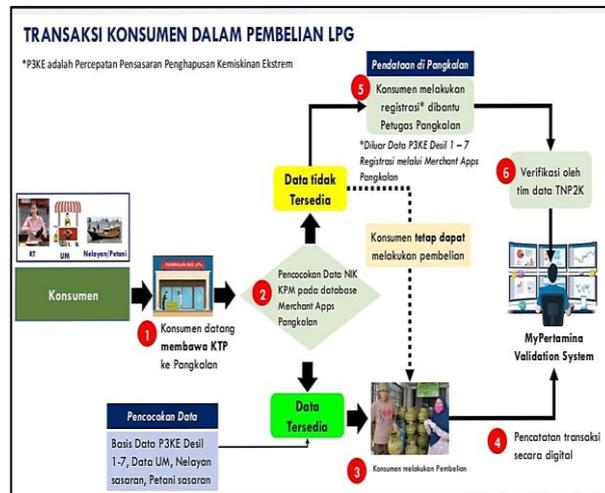
Pada dasarnya responsivitas merujuk terhadap kemampuan pemerintah dalam menjadikan kebutuhan atau tuntutan masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan serta penyediaan layanan publik. Hal ini dimaksudkan bahwasannya responsivitas sebagai kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat nantinya akan dirumuskan melalui alternatif pemecahan masalah serta bagaimana mengambil tindak lanjut sebagai penyelesaian atas persoalan yang berlangsung (Setianingrum & Tsalatsa, 2016).

Berangkat dari dilema mengenai sasaran program serta proses distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya yang sebelumnya masih ditemukan beberapa pengguna subsidi LPG 3 kg diluar kelompok sasaran tentunya diperlukan solusi alternatif untuk memecahkan persoalan yang terjadi. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 dan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 yang sudah disosialisasikan menyebutkan bahwasanya kewenangan dari pemerintah daerah adalah: a) Memberikan rekomendasi untuk pendirian penyalur (agen) LPG; b) Memberikan rekomendasi untuk pendirian sub penyalur (pangkalan); c) Melakukan pembinaan serta pengawasan pendistribusian subsidi LPG tabung 3 kg sebagai barang penting yang meliputi pengendalian ketersediaan dalam jumlah yang memadai, mengedepankan mutu, serta harga. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Surabaya tentunya juga memberikan respon cepat tanggap yang mana jika ditemukan adanya kecurangan serta permasalahan dalam program subsidi tersebut maka akan dikembalikan kepada pihak PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia serta pendistribusian LPG 3 kg oleh *subholding* PT Pertamina Patra Niaga.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan pelaksanaan program dan kuatnya asumsi dasar terkait tujuan yang ada (Lejiu et al., 2014). Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, dapat dikatakan bahwa program distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Program tersebut telah memberikan manfaat atau tujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satunya melalui subsidi LPG 3 kg. Dalam hal ini, distribusi ke pangkalan sudah dilaksanakan berdasarkan kuota yang telah disesuaikan oleh pemerintah.

Gambar 4.1 SOP Konsumen dalam Pembelian LPG 3 Kg
Sumber: Kementerian ESDM



Gambar 4.1 di atas merupakan alur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) konsumen dalam pembelian LPG 3 kg. Sesuai SOP yang ada, konsumen yang membeli LPG tabung 3 kg diharuskan sudah mendaftarkan pada *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite dan setiap pembelian diharuskan membawa KTP dan KK untuk mencocokkan NIK yang telah terdaftar guna menghindari pemalsuan identitas. Hal tersebut secara tidak langsung turut mendukung pemenuhan indikator ketepatan dalam pendistribusian LPG 3 kg.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah hasil evaluasi program distribusi subsidi LPG 3 kg di Kota Surabaya sudah terealisasi secara optimal dalam mencapai tujuan utamanya yakni mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator evaluasi antara lain: *a) Efektivitas*, hasil dari pelaksanaan program berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa program ini terealisasi dengan baik dan memberikan hasil yang efektif dalam jalannya program tersebut; *b) Kecukupan*, pada indikator kecukupan program ini berjalan dengan baik dengan jumlah LPG yang memadai, mutu baik, dan harga yang terjangkau; *c) Pemerataan*, pada indikator pemerataan dapat diketahui bahwa kini pembelian LPG tabung 3 kg hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite agar memberikan manfaat yang merata melalui distribusi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya; *d) Responsivitas*, dalam hal ini jika ditemukan adanya kecurangan serta permasalahan dalam program subsidi LPG 3 kg maka peran pengawas dari Pemerintah Kota Surabaya akan melimpahkan kepada pihak PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia serta pendistribusian LPG 3 kg oleh *subholding* PT Pertamina Patra Niaga; dan *e) Ketepatan*, pada indikator ini juga telah berjalan sebagaimana mestinya seperti halnya ketika konsumen yang hendak membeli LPG tabung 3 kg diharuskan sudah mendaftarkan pada *Merchant Apps* Pangkalan Pertamina Lite dan setiap pembelian diharuskan membawa

KTP untuk mencocokkan NIK yang telah terdaftar guna menghindari pemalsuan identitas.

Adanya proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sangatlah penting dalam hal pendistribusian subsidi LPG 3 kg. Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan penyaringan terhadap konsumen/pengguna dengan sistem aplikasi. Berangkat dari proses pengawasan ini Pemerintah Kota Surabaya tentunya sudah melarang restoran, *workshop*, dan sejenisnya untuk mengkonsumsi subsidi LPG tabung 3 kg dalam setiap kegiatan operasionalnya.

REFERENSI

- BPS. (2020). *Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020*. BPS. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2022/01/17/2295/distribusi-persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-dan-bakar-utama-untuk-memasak-di-provinsi-jawa-timur-2020.html>
- BPS. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa) 2021-2023*. BPS. <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>
- CNBC Indonesia. (2021). *Pemerintah Akui Subsidi LPG Saat Ini Tak Tepat Sasaran*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211229122005-4-302928/duh-pemerintah-akui-subsidi-lpg-saat-ini-tak-tepat-sasaran>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Huda, S., As'ad, M. U., & Kuncoro, D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kota Banjarbaru. *Uniska*.
- JawaPos. (2024). *Aturan Distribusi LPG 3 Kg Bisa Terkendala Teknis dan Moral Hazard*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/ekonomi/013705313/aturan-distribusi-lpg-3-kg-bisa-terkendala-teknis-dan-moral-hazard>
- Keputusan Menteri ESDM. (2023). *Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran*.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada kecamatan long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515-526. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/538>
- Liputan6. (2023). *Pertamina Pastikan Rantai Distribusi LPG 3 Kg di Jatim, Minta Warga Beli di Pangkalan Resmi*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5324887/pertamina-pastikan-rantai-distribusi-lpg-3-kg-di-jatim-minta-warga-beli-di-pangkalan-resmi>
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 953-960.
- Peraturan Presiden RI. (2007). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

- untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Setianingrum, & Tsalatsa. (2016). Questioning the Responsiveness of Public Services on Management of Complain Cases of UPIK in Yogyakarta City. *Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan*, 24(1), 1–25.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wowiling, V. G., Posumah, H. J., & Londa, V. Y. (2018). Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).